



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

**BIRO HUBUNGAN
MASYARAKAT
DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI**

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Triwulan I 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan yang sudah diberikan. Dan kepada para pihak lainnya yang sudah terlibat dalam penyusunan, turut kami ucapkan terima kasih .

Pada tahun anggaran 2024, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Triwulan I tahun 2025 serta pembahasannya yang relevan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2025 ini mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 14 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2025 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 17 April 2025
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

ttd

Zaki Mubarok

ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan.....	1
c. Tugas dan Fungsi	1
d. Sumber Daya Manusia.....	3
e. Potensi.....	3
f. Permasalahan dan Tantangan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal	5
b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025	5
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2025.....	5
d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	11
IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	14
IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.....	18
IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP.....	19
IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik	21
IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	23
IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	26
IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN	28
IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN	30
IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN	31
IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN	32
IK 13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri.....	33

IK 14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	34
.....	34
BAB IV PENUTUP	37
Kesimpulan	37
Saran	37
Tindak lanjut untuk penyesuaian kegiatan	38
Penyesuaian anggaran	39
Evaluasi pencapaian kinerja	39
Penyesuaian perencanaan	39
Perubahan budaya kinerja	40
LAMPIRAN	41
Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Posisi dan Struktur Biro HKLN dalam Sekretariat Jenderal	2
Gambar 2 <i>Screen capture</i> aplikasi kinerjaku Triwulan I 2025 untuk akun Biro HKLN	9
Gambar 3 <i>Screen capture</i> Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan I 2025 ..	10
Gambar 2 KKP News Edisi Februari 2025	20
Gambar 5 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan anggota DPR Pada Kasus Pemagaran Laut di Kabupaten Bekasi	25
Gambar 6 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan anggota DPR Pada Kasus Pemagaran Laut di Kabupaten Bekasi	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan I tahun 2025.....	3
Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025	5
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2025	7
Tabel 4 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2025	8
Tabel 5 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I 2024	11
Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023.....	11
Tabel 7 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023	14
Tabel 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	14
Tabel 9 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	16
Tabel 10 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023.....	16
Tabel 11 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan.....	18
Tabel 12 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	18
Tabel 13 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik	19
Tabel 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	19
Tabel 15 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik.....	21
Tabel 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2018 s.d. 2024.....	21
Tabel 17 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I 2025.....	23
Tabel 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023.....	23
Tabel 19 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan...	27
Tabel 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	27
Tabel 21 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025.....	28
Tabel 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2018 s.d. 2024.....	28
Tabel 23 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025.....	30
Tabel 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	30
Tabel 25 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025	31
Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023.....	31

Tabel 27 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan I 2025	32
Tabel 28 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	32
Tabel 29 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025	33
Tabel 30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	33
Tabel 31 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2024 ..	34
Tabel 32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023	34
Tabel 33 Kegiatan Tindak Lanjut Untuk Penyesuaian Kegiatan Tahun 2025 Pasca Triwulan I	38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro HKLN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait, pada tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dieksplisitkan ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja (IKK) dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Jumlah IKK yang realisasinya dapat diukur pada Triwulan I 2025 adalah sebanyak 6 (enam) IKK yaitu:

1. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dengan hasil sebesar 100%;
2. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebesar 95,37;
3. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti dengan hasil sebesar 65%;
4. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil sebesar 83,31%;
5. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional dengan hasil sebesar 9,50%; dan
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro HKLN dengan hasil sebesar 100%.

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) yang merupakan aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN pada triwulan I 2025 adalah 108,83. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Biro HKLN memperoleh predikat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2025. Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN juga memuat pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan I Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh tim kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab pada setiap triwulan kepada pengelola kinerja Biro HKLN. Selanjutnya kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui system yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah:

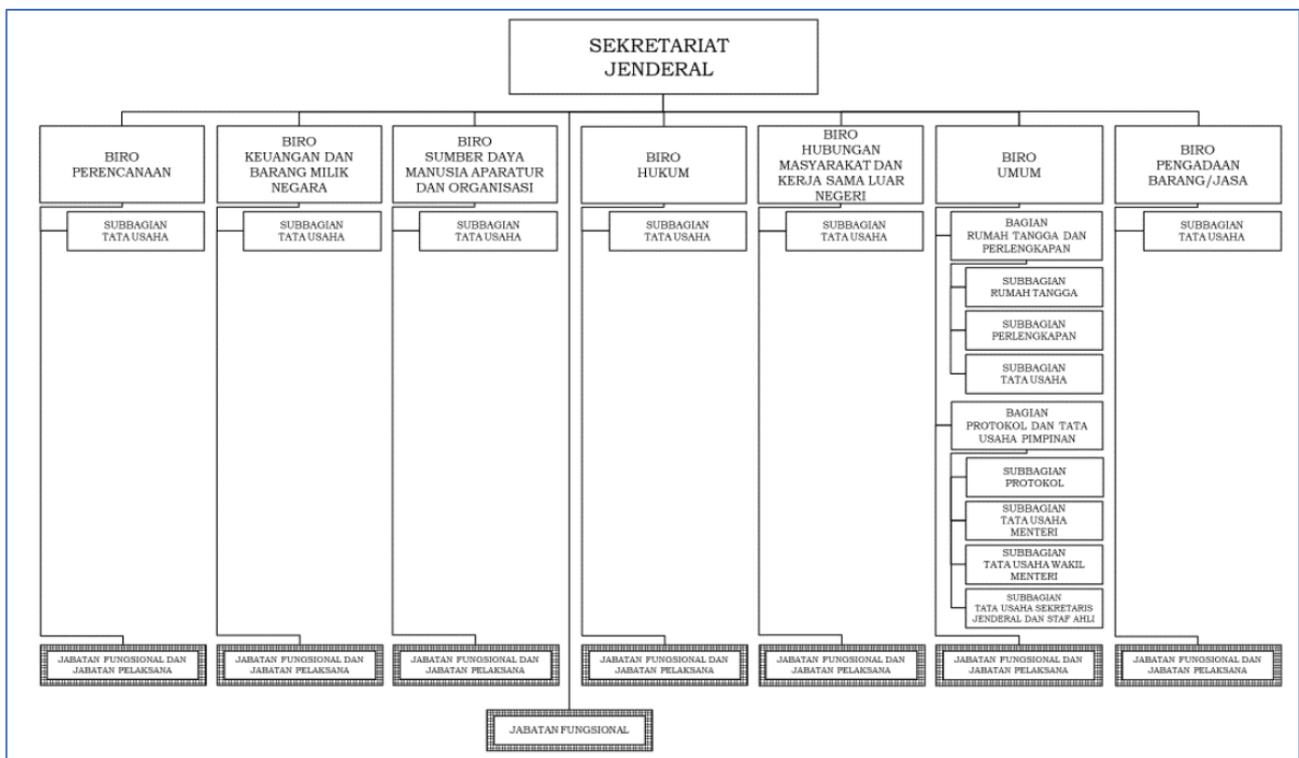
- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

c. Tugas dan Fungsi

Terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat Kementerian dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi Biro HKLN:

- penyiapan koordinasi, perencanaan, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;
- penyiapan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan layanan informasi publik;
- penyiapan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
- penyiapan koordinasi, pelayanan, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan pengelolaan perpustakaan; penyiapan koordinasi, penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- penyiapan koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.



Gambar 1 Posisi dan Struktur Biro HKLN dalam Sekretariat Jenderal

Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri melainkan mengadopsi tugas, fungsi, visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

- penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas,
- pembinaan, dan
- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, rumusan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen, dan
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada Triwulan I tahun 2025 berjumlah 81 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan I tahun 2025

No	Jabatan/Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro HKLN	1
2	Pemberitaan dan Opini Publik	30
3	Layanan Informasi Publik	9
4	Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	9
5	Kerja Sama Bilateral	- 7
6	Kerja Sama Multilateral	9
7	Dukungan Manajerial	14
8	Diperbantukan/dipekerjakan	2
Jumlah		81

e. Potensi

Potensi yang dimiliki Biro HKLN dalam melaksanakan dan memenuhi tugas dan fungsi Biro HKLN sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait adalah:

- a. Komitmen kuat dari Kepala Biro HKLN mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Sumber daya manusia baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang berintegritas, handal, tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro HKLN;
- c. Lebih dari 70% atau mayoritas sumber daya manusia Biro HKLN telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Diantaranya berasal dari perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri seperti Sekolah Tinggi Perikanan, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dab beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti di negara Inggris, Jepang, Australia, dan Korea Selatan;
- d. Biro HKLN memiliki *network* nasional dan internasional yang luas termasuk dengan organisasi-organisasi multilateral/kerja internasional seperti PBB, WTO, IMF, Bank Dunia, ILO, IMO, ASEAN, Uni Eropa, dan CTI-CFF yang sangat bermanfaat diantaranya dalam mendukung ekspansi pasar dan negosiasi dagang komoditas kelautan dan perikanan Indonesia;
- e. Sumber daya manusia Biro HKLN yang bergerak dalam bidang komunikasi publik dan kehumasan adalah asset unggul, berharga dan berpengalaman yang dimiliki KKP dan telah menunjukkan prestasi memenangkan peringkat/*score* tertinggi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
- f. sarana dan prasarana aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang memadai sebagai anugerah kinerja dan pelaksanaan komitmen pimpinan Biro HKLN.

f. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (*strategic issue*) adalah permasalahan utama dan/atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu Biro HKLN merumuskan bahwa isu strategis atau permasalahan, hambatan dan tantangan juga adalah kondisi yang harus menjadi fokus perhatian dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN.

Adapun isu strategis menantang yang telah diidentifikasi untuk tahun 2025 adalah kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, dan peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy tidak selalu mudah terutama karena faktor eksternal yang sangat dinamis dan hubungan masyarakat KKP harus tetap dipelihara fungsinya sebagai sarana komunikasi KKP dengan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Sampai dengan waktu penyusunan laporan ini, dokumen yang digunakan adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP tahun 2025-2024.

b. Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Biro HKLN melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada 24 Januari 2025. Biro HKLN pada tahun anggaran 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 28.672.222.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Substansi Perjanjian Kinerja yaitu Sasaran Kegiatan dan butir-butir Indikator Kinerja dan targetnya dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan diperoleh Biro HKLN sebagai hasil pelaksanaan seluruh Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro HKLN pada akhir tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, rumusan sasaran Biro HKLN pada tahun 2025 adalah:

- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional;
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional;

- Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Dalam rangka mewujudkan dan memungkinkan terukurnya sasaran-sasaran di atas maka seluruh dibentuklah Indikator Kinerja yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif supaya memberi kita ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja. Butir-butir Indikator Kinerja juga merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari informasi kinerja Biro HKLN Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN;
- Membantu pihak yang akan merumuskan penganggaran yang berbasis pada kinerja;
- Memudahkan Biro HKLN untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung;
- Mengubah paradigma kerja menjadi kinerja;
- Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Biro HKLN untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia;

Manfaat lainnya dari informasi kinerja mencakup paradigma bahwa program dan kegiatan yang memiliki output dan outcome yang jelas yang dihasilkan sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Implikasinya adalah seluruh jajaran Biro HKLN terpacu untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Selain itu, Biro HKLN semakin mampu memberikan pelayanan kepada publik internal KKP yang baik

d. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029, Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025

Keselaran dalam perencanaan indikator kinerja pada hakikatnya turut menjadi prasyarat pemenuhan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan semangat yang diusung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Detil IKK Biro HKLN tahun 2025 dan target IKK Triwulan I 2025 yang disandingkan dengan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029 tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Biro HKLN Triwulan I 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2025	Target Tw I
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	20
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	10
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96	-
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87	-
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85	85
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100	-
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi dan Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Ketua Tim Dukungan Manajemen Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual masing masing IKK yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN periode triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar berikutnya adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per 14 April 2025.

Tabel 4 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target Tw I	Realisasi Tw I	Persentase Capaian	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95	20	65	120%
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88	88	83,31	94,67%
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93	10	9,5	95%
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97	-	-	-
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96	-	-	-
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95	95	100	105,26%
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90	90	95,37	105,97%
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87	-	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87	-	-	-
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100	-	-	-
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85	85	100	117,65%
		13	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100	-	-	-
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95	-	-	-



NKO Maret - 2025

Download

Unit Kerja : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI

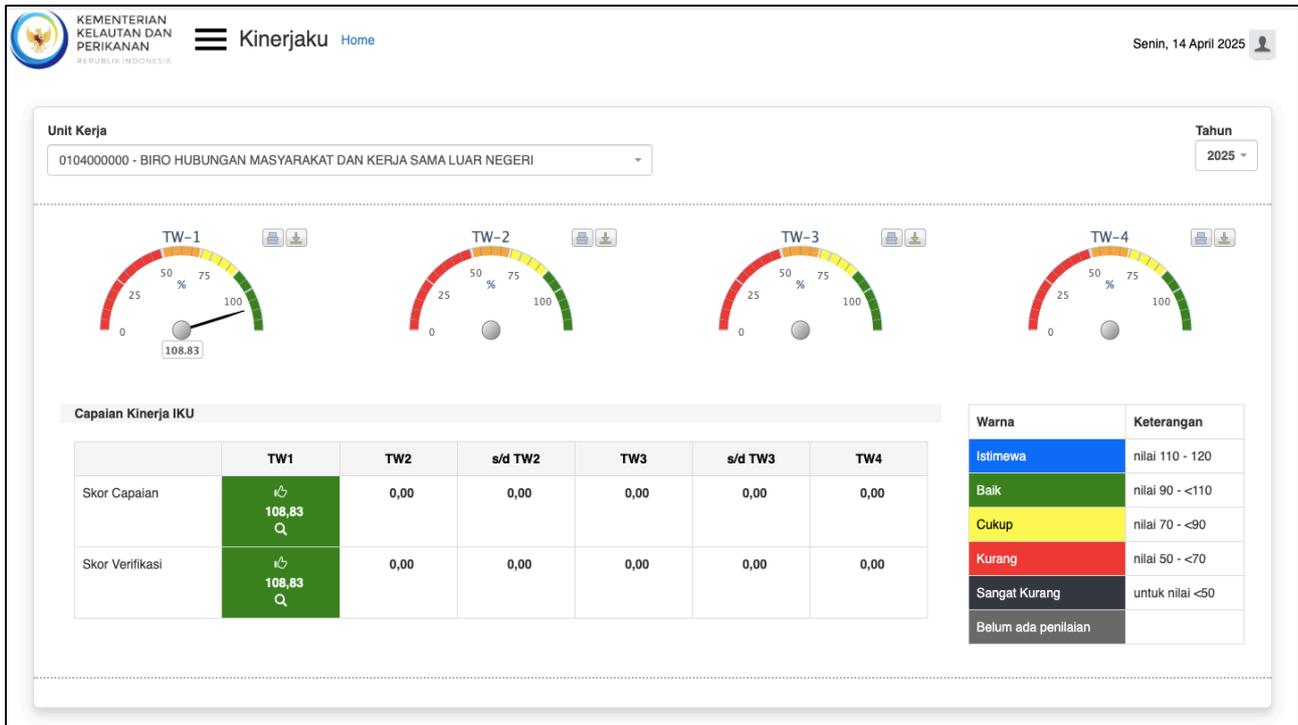
Skor Kinerja : 108.83

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✘, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 🔄
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input	
SK.01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri							103,23			103,23		
IKSK.1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	20,00	65,00	120,00	20,00	65,00	120,00	13-Apr-2025 23:23	
IKSK.2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	83,31	94,67	88,00	83,31	94,67	13-Apr-2025 23:23	
IKSK.3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Akumulasi	93,00	10,00	9,50	95,00	10,00	9,50	95,00	13-Apr-2025 23:23	
IKSK.4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%) Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	
SK.02	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik							105,62			105,62		
IKSK.02.1	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	97,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	
IKSK.02.2	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	
IKSK.02.3	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	13-Apr-2025 23:23	
IKSK.02.4	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	90,00	95,37	105,97	90,00	95,37	105,97	13-Apr-2025 23:23	
SK.03	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN							117,65			117,65		
IKSK.03.1	Nilai PM SAKIP Biro HKLN Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	
IKSK.03.2	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	
IKSK.03.3	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	
IKSK.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN Data Dukung1 ✓ 🔄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	85,00	100,00	117,65	13-Apr-2025 23:23	
IKSK.03.5	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	
IKSK.03.6	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		13-Apr-2025 23:23	

Tutup

Gambar 2 Screen capture aplikasi kinerjajaku Triwulan I 2025 untuk akun Biro HKLN



Gambar 3 *Screen capture* Dashboard Kinerja Biro HKLN Pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan I 2025

Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I tahun 2024
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024)
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) jika terdapat pemeringkatan yang diterbitkan K/L Penilai posisi/peringkat KKP secara nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKK selama triwulan I tahun 2025.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IKK baik antar unit kerja/KL maupun instansi dan lembaga terkait.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian.
8. Untuk IKK yang bersifat tahunan, tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja dengan menyampaikan progres kegiatan pendukung yang telah dilakukan di triwulan I dengan dilengkapi dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK.

IK 1 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Perjanjian internasional adalah Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Sedangkan tindak lanjut atau implementasi adalah tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan/penerapan atas kesepakatan internasional

Tabel 5 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I 2024

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
20%	65%	120%	15%	50%	120%	95%	nihil	68,42%

Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	57,69%

IKK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru dikenalkan Biro HKLN pada tahun 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama' dengan target di triwulan I 2025 sebesar 20%.

Pada tahun 2025, terdapat 20 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 20 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation (sudah ditindak lanjut);
2. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain;
3. Maritime and Fisheries Surveillance System Project Spain - KKP (sudah ditindak lanjut);
4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme;
5. Plan of Action Strategic Partnership RI - Perancis (sudah ditindak lanjut);
6. Technical Cooperation Agreement Proyek Kerja Sama ALDFG KKP – AFD (sudah ditindak lanjut);
7. Eco Fishing Port Project ;
8. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022 (sudah ditindak lanjut);
9. Joint Declaration Indonesia - Norwegia ;
10. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD (sudah ditindak lanjut);
11. Proyek Solar Cold Chains for Green Economy in Indonesia;

12. Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the United Kingdom of England concerning Cooperatives Activities in Maritime Affairs ;
13. Blue Planet Fund (sudah ditindak lanjut);
14. Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of The United Arab Emirates (sudah ditindak lanjut);
15. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA (sudah ditindak lanjut);
16. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia (sudah ditindak lanjut);
17. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission (sudah ditindak lanjut);
18. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation (sudah ditindak lanjut);
19. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation;
20. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Rural Affairs of The People's Republic of China on Fisheries Cooperation (sudah ditindak lanjut).

Hingga akhir triwulan I 2025, dari 20 dokumen kerja sama 13 diantaranya telah ditindak lanjut. Oleh karena itu, berdasarkan formula berikut:

$\%KS \text{ Bilateral} = (\text{Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti} / \text{Jumlah dokumen KS yang aktif}) \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang merupakan hasil tindak lanjut dokumen kerja sama bilateral yang aktif.
- Jumlah dokumen kerja sama yang aktif adalah dokumen kerja sama bilateral yang masih berlaku dan direncanakan akan ditindaklanjuti pada tahun 2025.

Maka realisasi indikator kinerja 'Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti' pada triwulan I 2025 adalah 65%. Target indikator kinerja ini pada triwulan I 2025 adalah 20% maka capaian adalah 325%. Oleh karena besar capaian melebihi 120% maka aplikasi kinerja menghitung dan menetapkan capaian IK ini di triwulan I 2025 sebesar 120%.

Dibandingkan dengan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029, persentase capaian IKK ini menjadi 68,42%. IKK ini juga tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan perbandingan. Pencapaian target IKK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena itu tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan Tim Kerja Sama Bilateral memenuhi target IKK ini adalah:

- Beberapa kegiatan kerja sama bilateral Amerika dan Eropa , Asia Pasifik, dan Afrika Timur Tengah pelaksanaannya sesuai atau lebih awal daripada jadwal indikatif penyelenggaraan melalui pertemuan yang dilakukan baik secara virtual dan melalui tatap muka;

- Rencana kegiatan kerja sama luar negeri konteks bilateral pada tahun 2025 yang diimplementasikan oleh Biro HKLN terutama yang lebih awal daripada rencana jadwal terutama karena didorong oleh fakta bahwa keikutsertaan KKP di fora kerja sama bilateral melalui Biro HKLN dalam rangka implementasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dan peran serta posisi Biro HKLN sebagai unit kerja KKP pembina hubungan internasional di lingkup KKP ternyata selalu dipandang penting dan diperhitungkan dan menjadi mediator yang berpengalaman di KKP; dan
- Posisi dan keberadaan KKP yang mewakili Republik Indonesia dalam percaturan internasional sektor kelautan dan perikanan di forum bilateral selalu dipandang strategis dan sangat diperhitungkan. Hal ini tercermin dari partisipasi delegasi RI dalam kegiatan kerja sama luar negeri seperti pertemuan bidang kelautan dan perikanan atau pendampingan dan supervisi Biro HKLN dalam kegiatan kerangka kerja sama Amerika Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika Tlimur Tengah. Sumbangsih pemikiran dari para pejabat dan pegawai Biro HKLN di forum internasional yang diikuti oleh KKP kerap diakui kreatif, inovatif, *out of the box* dan memberikan solusi. Hal ini setidaknya nampak dari penyambutan, penanggapan dan penerimaan yang positif dari negara mitra, dan oleh organisasi-organisasi kerja sama regional dan multilateral, serta juga dibuktikan melalui apresiasi terhadap substansi dokumen kerja sama kelautan dan perikanan Indonesia yang diajukan dan dipantau oleh delegasi Biro HKLN.

Tidak ada kendala serius yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi target IKK pada periode triwulan I 2025. Rencana aksi untuk triwulan atau triwulan-triwulan berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang meneruskan penindaklanjutan dokumen kerja sama bilateral yang tersisa. Penindaklanjutan tersebut tentunya berdasarkan arahan dari pimpinan Biro HKLN. Tidak ada laporan resmi bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Biro HKLN baik sumber daya manusia maupun sumber daya manusia.

IK 2 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) oleh Biro HKLN diperoleh dari survei kepuasan pelayanan kepada pengguna yang telah menerima layanan pengurusan administrasi izin PDLN yang mencakup pengajuan izin PDLN ke Kementerian Sekretariat Negara, pengajuan pembuatan paspor dinas dan rekomendasi visa (bagi PDLN yang memerlukan visa) ke Kementerian Luar Negeri. Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan secara berkala. Responden pengisi kuesioner adalah pelaku PDLN dan narahubung PDLN di unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan.

Tabel 7 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
88%	83,31%	94,67%	88%	88,61%	100,69%	88%	nihil	94,67%

Tabel 8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2025, telah tersedia besar realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP. Hal ini dikarenakan penghitungan IK di tahun 2025 bersifat triwulanan. Pada triwulan yang sama di tahun 2024, sudah ada hasil penghitungan IKK dan realisasi pada triwulan I 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan I 2025. Untuk mengetahui persentase kepuasan, Biro HKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online pada triwulan I 2025 memakai aplikasi google forms survey.

Pertanyaan disampaikan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana? dan
9. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Hasil pengolahan atas persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP periode triwulan I 2025 adalah sebesar 83,31%. Hasil ini diperoleh dari 6 orang responden yang mengisi dan menyerahkan kuisisioner. Oleh karena target Indikator Kinerja ini di triwulan I 2024 sebesar 88% maka capaian Indikator Kinerja ini sebesar 94,67%.

Apabila mengacu kepada tabel di bawah ini yang diambil dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka, dengan realisasi sebesar 88,61%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP triwulan I 2025 adalah baik atau berkinerja baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Dibandingkan dengan target tahun 2025 Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 maka persentase capaian IKK ini sebesar 94,67%. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN berbentuk anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Realisasi IKK ini tidak berhasil memenuhi target. Tidak bisa ditarik konklusi penyebab mengapa tidak semua responden memberikan apresiasi atau penilaian maksimal/tertinggi kepada layanan administrasi PDLN yang sudah diberikan para staf Biro HKLN yang mengerjakan pelayanan administrasi PDLN sebab pertanyaan kuisisioner tidak memfasilitasi hal tersebut. Oleh karena itu, direncanakan agar staf pengurus administrasi PDLN selanjutnya memohon perkenan para responden untuk memberi apresiasi setinggi mungkin ketika akan mengisi kuisisioner terlebih kepada pertanyaan nomor (4) dan (8) karena pada triwulan I 2025 mendapatkan rerata apresiasi terendah. Meskipun demikian, staf pengurus administrasi PDLN di Biro HKLN akan menghormati sepenuhnya hak para responden dalam memberi keputusan menjawab daftar pertanyaan kuisisioner.

Beberapa progres kegiatan yang terpantau telah dilakukan oleh para pegawai Biro HKLN yang menjadi petugas administrasi PDLN pada triwulan I 2025 adalah:

1. Pemberian layanan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui pengurusan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Pemberian layanan pengurusan paspor dinas; dan
3. Pemberian layanan pengurusan visa.

IK 3 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Sebelum menghadiri pertemuan internasional, Delegasi RI wajib menyusun Pedoman Delegasi RI (Delri) agar tercipta keseragaman posisi Delri dan koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah. Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri yang didelegasikan kepada unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pedoman Delri tersebut memuat posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia terhadap isu yang dibahas di forum internasional dan Delri memperjuangkan posisi Indonesia untuk dapat diadopsi dalam laporan forum internasional tersebut.

Pengaruh dan peran Indonesia dalam suatu forum internasional dapat dilihat dari persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia yang diterima dalam forum internasional tersebut. Diterimanya posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa Delri dapat menyuarakan kepentingan nasional di level internasional. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dijabarkan salah satunya dalam bentuk program prioritas Kementerian.

- Posisi adalah kedudukan/pandangan/kepentingan RI dalam pembahasan suatu agenda/isu di forum internasional.
- Rekomendasi adalah usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespons suatu isu tertentu yang dibahas dalam forum internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.
- Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam forum internasional. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia dalam kerangka kerja multilateral.
- Diterima adalah dicatatnya/dicantumkannya/disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan internasional.

Laporan dan dokumen sidang dapat berbentuk Leaders' Vision, chairman's statement, joint statement, joint communique, declaration, laporan Delri, agreements, MOU's, summary record/ of discussion, plan of action, Treaty, Resolution, Charter, Terms of References, rules of procedures, blue print, policy recommendation, non paper/note dan concept paper/note, framework of cooperation, Element of working document, atau work plan/program.

Tabel 9 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
10%	9,5%	95%	15%	22,86%	120%	93%	nihil	10,21%

Tabel 10 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	21,21%

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam dua tabel di atas, pada triwulan I 2025 Biro HKLN hampir memenuhi target IKK karena realisasinya 9,5% sehingga capaiannya menjadi 95% karena tergetnya adalah 10%. Sedangkan dibandingkan dengan rancangan awal renstra 2025-2029, capaian menjadi

10,21%. Tidak ada tersedia standar nasional untuk IKK ini yang dapat dipakai atau diacu sebagai pembanding. Selain itu dibanding dengan realisasi dan capaian di triwulan yang sama tahun 2024, maka terjadi penurunan pada keduanya.

IKK Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Pada tahun 2025, terdapat 21 (dua puluh satu) target yaitu diterimanya posisi Indonesia pada:

- 1) Dokumen ASEAN Common Understanding and Initiative on Sustainable Small-scale Aquaculture (SSA)
- 2) ASEAN Seafood Alliance
- 3) ASEAN SECTORAL WORKING GROUP ON FISHERIES (ASWGF)
- 4) ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)
- 5) ASEAN Network for Combating IUU Fishing (AN-IUU)
- 6) SEAFDEC Council Director Meeting
- 7) SEAFDEC Program Committee (PCM)
- 8) SEAFDEC Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership
- 9) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)
- 10) Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)
- 11) Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
- 12) Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) -Monitoring and Evaluation Working Group
- 13) CTI CFF_Pre-SOM/SOM ke-20
- 14) Coastal States Alliance (CSA) (*done*)
- 15) Food and Agriculture Organization (FAO)- The Fifth meeting of the Parties of Port State Measures Agreement
- 16) Food and Agriculture Organization (FAO)- Technical Working Group on Information Exchange PSMA
- 17) Our Ocean Conference (OOC) (Tw II/April 2025)
- 18) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
- 19) Indian Ocean Rim Association (IORA) Working Group on Blue Economy (*done*)
- 20) The Third United Nations Ocean Conference (UNOC)
- 21) Arafura and Timor Sea (ATSEA)

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari tim kerja sama regional dan multilateral Biro HKLN, hingga akhir Maret 2025, terdapat 2 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / KKP dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yaitu nomor (14) dan nomor (19). Berdasarkan manual indikator kinerja, realisasi IKK menjadi 9,5% dan capaian sebesar 95%. Penyebab Biro HKLN hampir berhasil memenuhi target IKK adalah perubahan sebuah kegiatan dari jadwal yang diharapkan dilaksanakan di triwulan I 2025. Oleh karena itu pada triwulan I tahun 2026 besar target Indikator Kinerja ini akan diturunkan dari 10% menjadi 7% atau lebih rendah. Juga koordinasi dengan organisasi multilateral terkait mengenai jadwal pelaksanaan akan tetap dilanjutkan. Pelaksanaan kegiatan terkait IKK didanai anggaran Biro HKLN dan didukung sumber daya manusia Biro HKLN sehingga tidak terjadi inefisiensi sumber daya. Rencana di triwulan berikutnya adalah mengikuti pertemuan multilateral yang tersisa dan mudah-mudahan organisasi kerja sama multilateral mitra Biro HKLN/KKP tidak ada lagi yang memundurkan kegiatan dari jadwal yang direncanakan.

IK 4 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Kepemimpinan pada Forum Regional/Multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia (Pemri) untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, atau sebagai anggota Organisasi Internasional (OI) dengan menduduki suatu jabatan strategis pada OI tersebut.

Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kegiatan dan melaksanakan program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi Focal Point OI tersebut, dalam hal ini adalah KKP. Forum Regional/Multilateral adalah organisasi dan pertemuan internasional di tingkat regional/multilateral. OI adalah institusi yang beranggotakan 3 negara berdaulat atau lebih.

Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa Komite dan Working Group, antara lain dapat menjadi Presidensi dan Ketua Organ Subsider. Indonesia juga dapat ditunjuk sebagai Host atau Co-Host, sebagai member of Bureau, Member of Council, Member of Board, Coordinator of (Group). Keberhasilan pencalonan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan

Tabel 11 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
-	-	-	-	-	-	100%	nihil	Belum

Tabel 12 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak ada ditetapkan besar target untuk IK untuk periode triwulan I 2025 karena penghitungan IKK ini adalah tahunan. Capaian IK ini tidak tersedia demikian juga dengan realisasinya serta tidak ada target triwulan I 2025. Tidak ada standar nasional untuk IKK ini. Rencana kegiatan yang akan dilakukan di triwulan adalah menunggu arahan dan bimbingan dari pimpinan di Biro HKLN yaitu Kepala Biro HKLN atau ketua tim kerja sama Multilateral seperti pengusulan pencalonan nama wakil Indonesia pada organisasi internasional/memimpin sidang internasional/tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional

IK 5 Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP

Sumber informasi hasil atau realisasi dari Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) Republik Indonesia. Besar indeks dihitung dari rerata nilai dimensi input dan dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang akan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2025 dan diumumkan biasanya pada akhir tahun anggaran.

Tabel 13 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
-	-	-	-	-	-	95	nihil	Belum

Tabel 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah IKK yang frekuensi penghitungannya bersifat tahunan. Oleh karena itu sebagaimana ditampilkan dalam kedua tabel di atas, belum ada hasil realisasi dan capaian untuk IKK ini pada triwulan I 2025. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, realisasi IKK baru diketahui pada akhir tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP adalah IKK yang bukan barang asing dan baru di tahun 2025 meskipun pada Triwulan I 2025 belum ada penetapan besar dan realisasi untuk IKK ini. Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2025, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

- a. Pengelolaan layanan produksi; dan
- b. Publikasi produksi video documenter.

Maka, sepanjang triwulan I tahun 2025, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan kegiatan seperti:

- a. monitoring media sosial dengan 3.908 data di twitter, 599 data di instagram, 1.784 data di facebook, 242 data di tiktok, dan 347 data di youtube;
- b. monitoring media massa dengan 7.725 pemberitaan di media online, 39 pemberitaan di media cetak, dan 1 pemberitaan di media tv;
- c. 7 kali konferensi pers
- d. Rilis 107 siaran pers;
- e. Produksi 4 episode podcast dan 3 episode KKP News
- f. Publikasi 2 berita terkait KKP melalui media; dan
- g. Penyusunan 10 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
 - 1) Strategi Komunikasi "Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut"
 - 2) Strategi Komunikasi "Kebijakan Pengelolaan Benih Bening Lobster"
 - 3) Strategi Komunikasi "Kebijakan Tata Kelola LKR (Lobster, Kepiting, Rajungan)"
 - 4) Strategi Komunikasi "Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi"

- 5) Strategi Komunikasi “Peningkatan Angka Konsumsi Ikan”
- 6) Strategi Komunikasi “Udang Sebagai Komoditas Unggulan”
- 7) Strategi Komunikasi “Kampung Nelayan Modern”
- 8) Strategi “Peluncuran Satelit Nano Bawah Laut Cakra-1”
- 9) Strategi Komunikasi “Pelaksanaan Modelling Penangkapan Ikan Terukur”
- 10) Strategi Komunikasi “Modelling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan”

Dan, terkait dengan publikasi produksi video documenter, telah dilaksanakan

- a. Produksi video Sinematik ekonomi biru;
- b. Produksi video Plesir pesisir di Dewi Bahari Padak Guar; dan
- c. Produksi Plesir pesisir wisata kuliner lobster.

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, tidak terdapat kendala serius di internal Biro HKLN seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peralatan dan pendanaan. Rencana kegiatan di triwulan berikutnya masih seputar aktivitas reguler yang terkait dengan pengelolaan layanan produksi; dan publikasi produksi video documenter.



Gambar 4 KKP News Edisi Februari 2025

IK 6 Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik adalah IKK baru Biro HKLN yang mulai menjadi tanggung jawab Biro HKLN untuk realisasi dan pencapaiannya pada tahun 2025. Pada hakikatnya, Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik analog dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu mengacu dan berlandaskan kepada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dimana tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada internal KKP terdiri dari:

- a. perencanaan dan
- b. pelaksanaan

Perencanaan meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup memuat penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik dan Indikator penilaian. Tahapan evaluasi mandiri Keterbukaan Informasi pada KKP terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengumuman. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek dinilai, terdiri atas 6 (enam) komponen indikator, yaitu sarana prasarana, kualitas Informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi; dan digitalisasi.

Tabel 15 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
-	-	-	-	-	-	94	nihil	-

Tabel 16 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2018 s.d. 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana yang ditampilkan dalam kedua tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2024, belum ada baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IK Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik. Jadwal atau periode penghitungan IKK bersifat tahunan. Pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Besar target IKK ini berdasarkan Rancangan Awal Renstra 2025-2029 adalah 94. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

Hasil di bawah ini merupakan kegiatan sebagai *progress* pemenuhan target kinerja dalam rangka pelaksanaan IKK sampai akhir triwulan I 2025:

1. Melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP melalui pengelolaan layanan informasi publik (Permen KP 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan KKP);
2. Mengelola layanan informasi publik melalui operasionalisasi ruang layanan PPID KKP (GMB III lantai GF);
3. Mengelola kanal layanan informasi publik (call center, e-ppid, email humas & PPID, whatsapp KKP, media sosial KKP);
4. Mengelola laman resmi Kementerian (situs web KKP, portal PPID, situs web perpustakaan KKP/aplikasi Archipelago);
5. Mengembangkan strategi layanan komunikasi dan informasi (SK PPID, pemutakhiran dan penyusunan SOP LIP): 5 pemutakhiran (done) dan 19 penyusunan SOP baru ;

6. Menyiapkan dokumen layanan informasi publik (dokumen hasil-hasil survei LIP: SKM, SPAK dan SPKP): per triwulan;
7. Melaksanakan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan layanan informasi publik (inisiasi kerja sama dengan BNSP untuk sertifikasi);
8. Melaksanakan perencanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik internal KKP; dan
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh KIP (Monitoring sedang berlangsung, dan Evaluasi melalui pengisian SAQ akan dilaksanakan kuartal akhir) sehingga hasilnya KKP mendapatkan nilai keterbukaan informasi publik

Beberapa data yang relevan dengan layanan prima yang diberikan oleh Tim Kerja Layanan Informasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah layanan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui permohonan informasi publik adalah:
 - a. Permohonan langsung ke ruang PPID KKP: 585 permohonan
 - b. Permohonan melalui aplikasi e-PPID: 928 permohonan
 - c. Permohonan melalui kanal lainnya (email dan medsos): 2.892 permohonan
2. Jumlah pengajuan keberatan (total): 1 pengajuan
3. Pengaduan layanan BHKLN (SP4N Lapor): 69 pengaduan
4. Jumlah pengajuan keberatan (total – per Maret 2025): 1 permohonan (DJPT)
5. Pengaduan layanan BHKLN (SP4N Lapor – Per Maret 2025): -

Untuk triwulan berikutnya, kemungkinan besar kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan reguler Biro HKLN dalam memberikan layanan informasi publik sehingga tidak ada perbedaan nyata dengan yang telah dilaksanakan di triwulan I 2025.

IK 7 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan III 2023. Pengukuran persentase efektifitas layanan dilakukan dengan penyebaran survei kepada stakeholder (seperti sekretariat Komisi IV DPR, pihak internal KKP dan lain sebagainya) yang telah menerima layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang nilainya diperoleh melalui pengisian kuisisioner oleh stakeholder di sepanjang Tahun 2024 setelah dilakukan penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) seperti kegiatan kunjungan-kunjungan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 17 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	96	nihil	104,17%
95%	100%	105,26%	89%	94,44%	106,11%			

Tabel 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data pada kedua tabel di atas menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2024, telah ada realisasi untuk IKK ini yaitu sebesar 94,44% dan oleh karena target IK adalah 89% maka capaiannya menjadi 106,11%. Sedangkan pada triwulan I 2025 realisasi Indikator Kinerja ini meningkat menjadi 100%. Namun capaiannya mengalami penurunan karena besar target di tahun 2025 berubah yaitu naik menjadi 95%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir dalam rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu 96% maka capaian dari IKK ini adalah 104,17%. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk IKK ini.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang besarnya diperoleh dari penilaian oleh stakeholder melalui pengisian kuisisioner. Sepanjang Triwulan I 2025 telah dilakukan beberapa kali penyebaran dan pengumpulan kuisisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) pada kegiatan kunjungan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manual IK telah menentukan efektifitas layanan hubungan lembaga yaitu dengan mengacu kepada matriks di bawah ini.

% Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00 - 64,99	Tidak Efektif
65,00 - 76,60	Kurang Efektif
76,61 - 88,30	Efektif
88,31 - 100,00	Sangat Efektif

Maka berdasarkan matriks di atas, kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang 88,31% sampai dengan 100%.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK ini yang dapat diidentifikasi adalah:

- Pengalaman tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan selama bertahun-tahun memberikan layanan prima hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP di bidang kelautan dan perikanan membuat tim kerja Komunikasi Kelembagaan sigap dan tangkas untuk mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan hubungan kelembagaan;
- Dukungan anggaran dapat dikatakan memadai untuk tim Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan menyediakan layanan yang prima dalam bidang hubungan lembaga kepada mitra kerja Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan;
- Arah dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam bekerja efektif dan efisien dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang hubungan kelembagaan kepada mitra kerja KKP di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran Biro HKLN yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif.

Layanan hubungan lembaga yang diberikan kepada stakeholder pada triwulan I 2025 adalah kepada kegiatan kunjungan kerja spesifik di 3 lokasi

1. Bekasi lokasi Pemagaran Laut
2. Kabupaten Tangerang (Pemagaran Laut dekat Post TNI AL)
3. Kabupaten Tangerang di lokasi Mangrove

Tim Kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan Biro HKLN mengawal kunjungan kerja pada periode Triwulan I 2025. Kuisisioner dibagikan kepada stakeholder Biro HKLN yaitu rekan-rekan yang bertugas di masing-masing lokasi yang membantu fasilitasi seperti penyambutan, koordinasi tempat makan, menu dan pembayaran pada saat jamuan makan siang di Bandar Djakarta PIK2.

Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi yang spesifik dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan untuk triwulan berikutnya dalam rangka pemenuhan target IKK adalah aktivitas reguler seperti di triwulan I yaitu pemberian layanan prima hubungan kelembagaan sesuai dengan arahan, bimbingan dan penugasan dari pimpinan di Biro HKLN.



Gambar 5 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan anggota DPR Pada Kasus Pemagaran Laut di Kabupaten Bekasi



Gambar 6 Layanan Hubungan Lembaga dari Biro HKLN Kepada Menteri KP dan anggota DPR Pada Kasus Pemagaran Laut di Kabupaten Bekasi

IK 8 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepuasan layanan diperoleh melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner yang dilakukan setiap triwulan. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada triwulan II tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang Triwulan I 2025, terdapat 12 responden yang terdiri dari 5 pria dan 7 wanita. Ke 12 responden tersebut menerima layanan yang jenisnya adalah:

- Layanan ISBN;
- Layanan penelusuran informasi; dan
- Layanan keanggotaan;

Tabulasi hasil pengolahan survey yang dilakukan Perpustakaan dapat dilihat dalam matriks berikut

	Unsur								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah	45	46	47	47	42	46	46	45	48
Rata-rata	3,75	3,83	3,92	3,92	3,50	3,83	3,83	3,75	4,00
Bobot	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
Rata rata x bobot	0,42	0,43	0,44	0,44	0,39	0,43	0,43	0,42	0,44
Nilai indeks IKM	3,81								
Nilai indeks IKM x 25	95,37								
Target	88								
Capaian	105,97%								

Tabel 19 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
90	95,37	105,97%	88	91,81	104,31%	93	Nihil	102,54%

Tabel 20 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Oleh karena itu sebagaimana ditampilkan dalam 2 tabel di atas, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan I 2024 adalah 95,37. Dengan target pada Triwulan I sebesar 90 maka capaian IKK ini adalah 105,97%. Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena besar Nilai Indeks SKM x 25 adalah 95,37 dan masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100. Dibandingkan dengan target terakhir rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu sebesar 93 maka capaian IKK adalah 102,54%

Faktor pendukung keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK adalah arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN tidak diabaikan oleh tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam mewujudkan karya, karsa dan kerja dalam rangka memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang perpustakaan kepada para *customer* perpustakaan KKP. Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN. Rencana kegiatan di triwulan berikutnya dalam rangka pemenuhan target IKK adalah melanjutkan pemberian layanan reguler perpustakaan KKP dengan memberi perhatian yang lebih lagi kepada aspek standar pelayanan.

IK 9 Nilai PM SAKIP Biro HKLN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tabel 21 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	87,8	nihil	Belum

Tabel 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2018 s.d. 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil													

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja ini belum tersedia di Triwulan I tahun 2025. Demikian juga dengan targetnya, sehingga capaian IKK ini di triwulan I 2025 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan I tahun 2024 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan.

Oleh karena semakin dekatnya waktu pelaksanaan pengukuran Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro HKLN oleh Biro Perencanaan, maka kegiatan triwulan I dan rencana di triwulan berikutnya tahun 2025 yang dapat direkomendasikan adalah membaca LKE PM SAKIP dan mencicil dokumen-dokumen yang termaktub dan diperlukan untuk memenuhi LKE.

Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2025.

Tujuan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan dibantu oleh pihak terkait adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Biro HKLN dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil).

Adapun rekomendasi SAKIP Biro HKLN tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Biro HKLN nomor Nomor : B.1247/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berupa catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2023 dan sudah ditindaklanjuti serta dapat diakses hasilnya melalui tautan https://bit.ly/BHKLN_TLEvSAKIP2023. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut terangkum dalam matriks di bawah ini.

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Tautan Bukti Dukung
1.	Perlu dilakukan internalisasi terkait Informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai memahami ukuran dan capaian kinerja unit kerja organisasi.	Pemberitahuan kepada pegawai Biro HKLN tautan publikasi Laporan Kinerja Biro HKLN 2023 di awal tahun 2024 supaya para pegawai tertarik membacanya.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1sY5V7uPnODRfhMFFPlueCDQMaOsWOGga?usp=sharing
2.	Perlu adanya peningkatan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan pengukuran kinerja secara berkala.	Substansi pidato Kepala Biro HKLN pada apel pagi mencakup rencana peningkatan keterlibatan Kepala Biro HKLN dalam kegiatan pengukuran kinerja	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1h-MJnXZ_5DDI0Py7Z8qegkN57pOSWSc8
3.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait 1 indikator kinerja yang belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Telah dibangun komunikasi dengan pejabat dari Biro Perencanaan KKP sehingga akan dilakukan tindak lanjut diantaranya dengan diskusi internal Biro Perencanaan atas indikator kinerja Biro HKLN belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/17PYr8Qcx6rM090eCEfvVYmdo5nQ0AdQz

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 23 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
-	-	-	-	-	-	89	nihil	-

Tabel 24 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sesuai dengan informasi tersaji dalam kedua tabel di atas, IKK ini belum memiliki angka realisasi untuk triwulan I tahun 2025. Hal serupa berlaku pada triwulan I tahun 2024 karena pengukuran IK ini bersifat semesteran. Pada akhir triwulan II Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Pemerintah kemungkinan besar akan menerbitkan hasil pengukuran IP ASN untuk setiap unit kerja di semua lingkup Sekretariat Jenderal KKP.

Oleh karena bersifat semesteran maka tidak ada penetapan target tertentu untuk IKK ini pada triwulan I 2025 sehingga otomatis belum ada persen capaiannya. Sedangkan target akhir tahun renstra untuk IKK ini adalah 87 dan tidak ada standar nasional yang bisa dirujuk Biro HKLN sebagai pembanding dalam kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Target IKK di akhir jangka menengah berdasarkan rancangan awal renstra 2025-2029 adalah 89. Tidak diperoleh informasi resmi adanya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan pencapaian target IKK ini sepanjang periode triwulan I 2025.

Kegiatan yang sudah dilakukan di Biro HKLN sepanjang triwulan dalam rangka pencapaian target IKK adalah berbagi informasi rencana kegiatan seminar (berbiaya gratis) melalui komunikasi digital di internal Biro HKLN melalui aplikasi whatsapp agar sebanyak mungkin pegawai Biro HKLN mengikutinya. Kegiatan yang direncanakan diselenggarakan di triwulan II 2025 adalah:

- berbagi informasi rencana kegiatan seminar (berbiaya gratis) melalui komunikasi digital
- penyampaian imbauan agar pegawai Biro HKLN mengunggah sertifikat yang diperoleh dari seminar ke aplikasi ekinerja.bkn.go.id

IK 11 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN

Tabel 25 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
Belum	Belum	Belum	-	-	-	100%	nihil	Belum

Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana tercantum dalam di atas, untuk triwulan I tahun 2025 belum ada hasil realisasi dari pengukuran IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada triwulan I Tahun 2025. Begitu juga dengan capaiannya karena selain belum adanya realisasi untuk IKK ini juga tidak ada target yang ditetapkan untuk triwulan I.

Pengukuran IK ini bersifat tahunan, sama seperti tahun/tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini yang menjelaskan di triwulan I tahun sebelumnya juga tidak ada realisasi untuk Indikator Kinerja yang sama. Meskipun belum ada realisasi dan capaian karena merupakan IKU tahunan, dalam laporan ini tetap disampaikan kondisi Ketua dan staf Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN yang senantiasa siap sedia untuk menyelesaikan laporan temuan BPK yang jika muncul di triwulan II atau III atau IV tahun 2025. Tidak ada berita resmi mengenai indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia

IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. akhir Triwulan I Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh mitra kerja di Sekretariat Jenderal yang menjadi objek pengawasan

Tabel 27 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan I 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
85%	100%	117,65%%	100%	100%	100%	89%	nihil	112,35%

Tabel 28 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100%, dengan target sebesar 85% maka capaiannya menjadi 117,65%. Dibanding dengan capaian untuk IKK yang sama di triwulan I 2024 maka terjadi peningkatan. Jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir rancangan awal renstra 2025-2029 yaitu sebesar 89% maka capaian IKK menjadi 112,35%.

Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Tidak termonitor keberadaan indikasi bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya Biro HKLN dalam bentuk anggaran, sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dalam segenap kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2025.

Kegiatan sebagai faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target IKU adalah:

- Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro HKLN memperhatikan dengan saksama dan siap, siaga untuk sigap menindaklanjuti apabila ada notifikasi rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendral yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Tim satker Biro HKLN berbudaya kerja cepat, cermat dan tepat mampu memberi dukungan penuh kepada setiap arahan dari jajaran pimpinan Biro HKLN serta menyadari bahwa setiap pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern dari Inspektorat Jendral pasti berguna untuk perbaikan kinerja lingkup Biro HKLN;
- Rencana aksi yaitu melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dilakukan dengan baik dan selamat.

Untuk triwulan berikutnya, Biro HKLN akan melanjutkan aktivitas reguler seperti di triwulan I dalam rangka memenuhi target IKK ini.

IK 13 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Di tahun 2025, yang diajukan Biro HKLN adalah Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik

Tabel 29 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2025

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	-

Tabel 30 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam kedua tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2025, belum terdapat realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Hal ini dikarenakan penghitungan IKK yang bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IKK ini. Target akhir jangka menengah dalam Rancangan awal Rencana Strategi untuk IKK ini adaah 100%. Pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang dapat dipedomani oleh Biro HKLN sebagai pembanding.

Hingga akhir triwulan I tahun 2025, Biro HKLN telah melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Biro Hukum untuk penyempurnaan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik. Diharapkan selambat-lambatnya di akhir tahun 2025 Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik telah disahkan menjadi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik serta mendapat pengesahan dari Kementerian yang berwenang. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi keefisienan apalagi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai). Untuk triwulan berikutnya, Tim Kerja Layanan Informasi Biro HKLN akan terus melanjutkan konsultasi atau koordinasi dengan Biro Hukum untuk penyempurnaan dan finalisasi.

IK 14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Persentase penyerapan anggaran Biro HKLN adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro HKLN dibandingkan dengan pagu anggaran Biro HKLN

Tabel 31 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2024

Triwulan I 2025			Triwulan I 2024			Target	Standar	Realisasi/
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Renstra	Nasional	Renstra
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	≥95	nihil	Belum

Tabel 32 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, belum dilakukan penghitungan realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN pada periode Triwulan I 2025. Demikian juga dengan targetnya tidak tersedia sehingga capaian IKK ini di triwulan I 2025 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan I tahun 2024 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan tepatnya di akhir tahun anggaran. Oleh karena belum ada realisasi di triwulan I 2025 yang perlu ditampilkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target akhir tahun yang kebetulan belum ditetapkan di dalam Renstra Sekretariat Jenderal yang belum ditetapkan. Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Sangat diyakini bahwa tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2025.

Kendati demikian, terdapat informasi *progress* penyerapan anggaran oleh Biro HKLN hingga akhir Maret 2025/triwulan I 2025 yang terangkum dalam matriks di bawah ini.

RINCIAN REALISASI ANGGARAN BIRO HUMAS DAN KLN							
PERIODE JANUARI S.D. 31 MARET 2025							
NO	KEGIATAN	KODE	PAGU REVISI	REALISASI	LOCK PAGU	SALDO	PERSENTASE
1.	Layanan Kerja Sama Bilateral	2328.PEC	455.530.000	238.992.993	-	216.537.007	52,46
2.	Layanan Kerja Sama Multilateral	2328.PEC	342.613.000	7.717.500	-	334.895.500	2,25
3.	Layanan Komunikasi Publik						
3.1	Layanan Pemberitaan dan Opini Publik	2328.BMB	1.094.810.000	409.549.518	-	685.260.482	37,41
3.2	Layanan Informasi Publik	2328.BMB	314.932.000	145.041.550	-	169.890.450	46,05
3.3	Layanan Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	2328.BMB	168.626.000	46.332.000	-	122.294.000	27,48
4.	Layanan Hubungan Masyarakat	2328.EBA.958	10.251.000	10.251.000	-	-	100,00
5.	Layanan Umum	2328.EBA.962	32.350.000	32.349.270	-	730	100,00
6.	Layanan Operasional Perkantoran	2328.EBA.994	685.058.000	402.247.611	-	282.810.389	58,72
7.	Video Dokumenter	2328.EBB.951.053.B	-	-	-	-	#DIV/0!
8.	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	2328.CAN.052	-	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah			3.104.170.000	1.292.481.442	-	1.811.688.558	41,64

a. Kinerja Anggaran Biro HKLN Tahun 2025

Realisasi anggaran Biro HKLN per 31 Maret 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp1.292.481.442 dari pagu efektif sebesar Rp3.104.170.000 atau persentase sebesar 41,64%. Adapun realisasi anggaran per Rincian Output (RO) dapat dilihat sesuai matriks di bawah ini.

Kode	Rincian Output	Realisasi
2322.PEC.001	Kerja Sama Internasional	246.710.493
2328.BMB.001	Komunikasi Publik	600.923.068
2328.EBA.958	Hubungan Masyarakat dan Informasi	10.251.000
2328.EBA.962	Layanan Umum	32.349.270
2328.EBA.994	Layanan Perkantoran	402.247.611
2328.EBB.951	Belanja Modal Lainnya (Video Dokumenter)	0
Jumlah		1.291.481.442

Nilai Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- Data capaian NKO BHKLN pada aplikasi Kinerjaku; dan
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran BHKLN.

Unit Kerja	Nilai Kinerja Organisasi	Anggaran	Realisasi	%	% NPSP x Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6 = 2x3	7 = 6-4
Biro HKLN	108.83	3.104.170.000	1.292.481.442	34.89%	337.826.821.100	336.534.339.658
					% Efisiensi = 7/3	100.38

b. Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai umpan balik Perencanaan 2026

Berikut ini adalah butir-butir evaluasi atas realisasi dan persentase capaian butir-butir IK Biro HKLN sepanjang Triwulan I 2025:

- a. Target IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional di Triwulan I tahun 2026 agar diubah menjadi masing lebih rendah daripada 10% karena kebanyakan kegiatan terkait IK ini dilaksanakan di triwulan terakhir;
- b. Meskipun mungkin tidak terlihat nyata oleh pimpinan dan rekan kerja, kebiasaan kerja dan kinerja yang tidak produktif seperti malas dan ceroboh tidak boleh dilanjutkan; dan
- c. Juga meskipun tidak bisa dilihat oleh oleh pimpinan dan rekan kerja, budaya kerja dan budaya kinerja keras, cerdas, cermat dan bersahaja yang dimiliki pegawai Biro HKLN harus diteruskan di triwulan-triwulan berikutnya.

c. Tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP

Tujuan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dengan dibantu oleh Inspektorat Jenderal KKP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Biro HKLN dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil). Pada triwulan I 2025 belum ada diterbitkan rekomendasi SAKIP tahunj 2025 untuk Biro HKLN.

Rekomendasi SAKIP Biro HKLN yang terakhir tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Biro HKLN nomor Nomor : B.1247/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berupa catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tahun 2023 dan sudah ditindaklanjuti serta dapat diakses hasilnya melalui tautan https://bit.ly/BHKLN_TLEvSAKIP2023. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi tersebut terangkum dalam matriks di bawah ini.

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Tautan Bukti Dukung
1.	Perlu dilakukan internalisasi terkait Informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai memahami ukuran dan capaian kinerja unit kerja organisasi.	Pemberitahuan kepada pegawai Biro HKLN tautan publikasi Laporan Kinerja Biro HKLN 2023 di awal tahun 2024 supaya para pegawai tertarik membacanya.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1sY5V7uPnODRfhMFFPlueCDQMaOsWOGga?usp=sharing
2.	Perlu adanya peningkatan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan pengukuran kinerja secara berkala.	Substansi pidato Kepala Biro HKLN pada apel pagi mencakup rencana peningkatan keterlibatan Kepala Biro HKLN dalam kegiatan pengukuran kinerja	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1h-MJnXZ_5DDI0Py7Z8qegkN57pOSWSc8
3.	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait 1 indikator kinerja yang belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Telah dibangun komunikasi dengan pejabat dari Biro Perencanaan KKP sehingga akan dilakukan tindak lanjut diantaranya dengan diskusi internal Biro Perencanaan atas indikator kinerja Biro HKLN belum tercantum dalam Renstra Setjen 2020-2024.	Sudah ditindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/17PYr8Qcx6rM090eCEfvVYmdo5nQ0AdQz

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari 14 Indikator Kinerja tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2025, pada triwulan I 2025 telah terdapat beberapa yang terealisasi yaitu:
 - a. IKS.1, Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 20%, realisasi 65% maka realisasi berdasarkan aplikasi kinerja menjadi 120%;
 - b. IKS.2, Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, target IK ini adalah 88% sementara realisasi IK mencapai angka 83,31% sehingga capaiannya adalah 94,67%;
 - c. IKS.3, Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 10%, realisasi 9,5%. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerja adalah 95%;
 - d. IKS.02.3, Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, realisasinya sebesar 100% Target IK ini adalah 95% maka capaiannya menjadi 105,26%;
 - e. IKS.02.4, Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP, realisasi IKU sebesar 95,37% dengan besar target yaitu 90%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 105,97%; dan
 - f. IKS.03.4, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasi sebesar 100 %. Target IKU ini untuk dipenuhi adalah 85% sehingga capaiannya menjadi 117,65%.
2. Pemenuhan target IKK Biro HKLN di triwulan I 2025 diyakini melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP yang dialokasikan untuk Biro HKLN dengan efektif dan efisien.

Saran

Memperhatikan hasil dan analisis atas capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN triwulan berikutnya tahun 2025 beberapa hal di bawah ini dapat menjadi bahan pertimbangan:

1. Biro HKLN seyogyanya terus memegang teguh dan melanjutkan etos berkinerja prima yang sudah ditunjukkan pada triwulan I tahun 2025. Beberapa etos kerja dan kinerja sebagai hasil dari implementasi budaya internal Biro HKLN arahan pimpinan adalah disiplin, kekeluargaan, kreatifitas, *thinking out of the box*, kebersamaan, keterbukaan, proaktif, integritas, responsif, berorientasi masa depan, *need for achievement*, kerja sama, dan tanggung jawab;
2. Memperkuat koordinasi di lingkup internal Biro HKLN dan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu para mitra kerja sama Biro HKLN guna mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian target semua IKU; dan
3. Terkait dengan penyerapan anggaran, perlu ditekankan untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan sinkronisasi waktu pelaksanaan penyerapan anggaran dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepastian atas efisiensi penganggaran kegiatan.

Tindak lanjut untuk penyesuaian kegiatan

Tindak lanjut berupa Kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya termaktub dalam tabel di bawah ini berdasarkan dokumen rencana aksi Biro HKLN tahun 2025.

Tabel 33 Kegiatan Tindak Lanjut Untuk Penyesuaian Kegiatan Tahun 2025 Pasca Triwulan I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN PENDUKUNG
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan kerja sama luar negeri	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	Pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi dokumen kesepakatan kerja sama bilateral (rapat koordinasi, keterlibatan KKP dalam pelatihan dengan negara mitra)
	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	Pemberian layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP
	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	Perumusan dan penyampaian posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	Pengusulan pencalonan perwakilan Indonesia pada organisasi internasional/memimpin sidang internasional/tuan rumah penyelenggaraan kegiatan internasional
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	Koordinasi seluruh tahapan dalam rangka pemenuhan penilaian indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada dimensi input meliputi: 1. Sumber Daya Manusia & Anggaran; 2. Bahan Informasi 3. Sarana dan Prasarana; 4. Media dan Saluran Komunikasi 5. Pengumpulan data dalam rangka perencanaan program 6. Perencanaan; 7. Pelaksanaan 8. Monitoring dan Evaluasi 9. Program Inovasi
	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	Penilaian LKE KIP
	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pameran di sektor KP dan melaksanakan pelayanan yang efektif pada lembaga mitra pada kegiatan sebagai berikut. 1. Pendampingan Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) 2. Pendampingan Kunjungan Kerja masa Reses atau Kunjungan Kerja spesifik 3. Pendampingan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan 4. Unjuk rasa
	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	Pelaksanaan kegiatan pelayanan pada 9 unsur penilaian pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yaitu: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	Pemenuhan seluruh aspek penilaian pada LKE
	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	Keikutsertaan pegawai Biro HKLN pada pelatihan
	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan BPK
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	Penyelesaian Rancangan Keputusan/Peraturan Menteri
	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	Penyampaian realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala

Penyesuaian anggaran

Berdasarkan *view* yang dilakukan oleh pegawai di Tim Kerja Dukungan Manajerial terhadap aktivitas sumber daya manusia Biro HKLN yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Biro HKLN sepanjang triwulan I tahun 2025, dinamika anggaran yang terjadi di awal tahun fiskal 2025 terutama karena kebijakan efisiensi tidak mempengaruhi secara nyata para sumber daya manusia Biro HKLN dalam bekerja dan berkreasi melalui kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pencapaian target Indikator Kinerja. Tentu saja faktor pendukung utama keberhasilan adalah kebijaksanaan dan kepiawaian Kepala Biro HKLN dalam mengarahkan dan membimbing sumber daya manusia Biro HKLN sepanjang triwulan I 2025. Faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah Biro HKLN memiliki sumber daya manusia andal yaitu pegawai-pegawai cerdas yang professional dan berpengalaman dalam bidang pekerjaan hubungan internasional, komunikasi dan kehumasan dan perpustakaan dan tidak diragukan dedikasi dan loyalitas mereka kepada pimpinan.

Evaluasi pencapaian kinerja

Above all, Nilai Kinerja Organisasi sebesar 108,83 adalah inti dari evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Indikator Kinerja Biro HKLN selama triwulan I 2025 dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, predikat yang diperoleh oleh Biro HKLN adalah 'baik'. Kata baik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa definisi, diantaranya yang relevan dengan laporan kinerja ini adalah:

1. elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya); dan
2. berguna; manjur (tentang obat dan sebagainya);

Oleh karena itu, secara keseluruhan kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan I 2025 tidak tak berguna dalam mendukung secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan visi dan dan mencapai misi Sekretariat Jenderal KKP serta pembangunan sektor kelautan dan sektor perikanan Indonesia.

Penyesuaian perencanaan

Berdasarkan pembahasan atau ulasan dari pencapaian target 14 IKK di atas selama triwulan I 2025, penyesuaian perencanaan pencapaian kinerja yang dipandang penting untuk dilakukan adalah untuk perencanaan pada periode triwulan I 2026 pada Indikator Kinerja 'Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional' yaitu target diturunkan menjadi lebih rendah dibanding target pada triwulan I 2025 karena berdasarkan pengalaman tahun 2024 dan 2025 pada triwulan pertama jumlah kegiatan kerja sama multilateral relative sangat sedikit dibanding triwulan terakhir.

Perubahan budaya kinerja

Definisi dari istilah ‘budaya’ menurut Bapak Antropologi Indonesia yakni Prof. Koentjaraningrat (alm) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Definisi ini cukup sejalan dengan definisi dari frasa ‘*performance culture*’ dari sebuah sumber yang dipercaya kredibel di internet yang terjemahan bebasnya ke dalam Bahasa Indonesia adalah ‘budaya kinerja’ yaitu ‘*A system that engages, develops, and inspires a diverse, high-performing workforce by creating, implementing, and maintaining effective performance management strategies, practices, and activities that support mission objectives.*’ Terjemahan bebas dari definisi ‘*performance culture*’ atau ‘budaya kinerja’ tersebut adalah ‘Sistem yang mengikat, mengembangkan dan menginspirasi tenaga kerja yang beragam dan berkinerja tinggi melalui pembentukan, pelaksanaan dan pemeliharaan strategi, praktik dan kegiatan manajemen kinerja guna mendukung pencapaian tujuan.’

Berdasarkan definisi ‘*performance culture*’ di atas dan berdasarkan hasil komunikasi informal dengan beberapa pegawai senior di Biro HKLN maka dapat disimpulkan bahwa Biro HKLN telah lama memiliki sistem kinerja yang cakap atau mumpuni (*excellent*). Hal ini terutama didorong oleh para pegawai yang mengerjakan tugas dan berfungsi mengelola hubungan internasional memiliki horizon berpikir atau wawasan yang tidak hanya dibatasi domestik namun mendunia dan ditularkan kepada pegawai yang mengurus kehumasan dan komunikasi. Apalagi pegawai yang menangani hubungan dengan negara-negara maju di Eropa, Asia dan Amerika Utara tidak jarang mempengaruhi para pegawai lainnya untuk tidak enggan mencontoh sumber daya manusia dari negara maju dalam bekerja dan berkarya.

Dengan demikian dapat disimpulkan kalau pelaksanaan SAKIP di Biro HKLN selama triwulan I 2025 tidak mengubah sistem atau ‘*performance culture*’ yang sejak lama dihayati dan berlaku di organisasi birokrasi dan sumber daya manusia aparatur Biro HKLN secara signifikan. Meskipun demikian, pelaksanaan SAKIP nyata telah memberikan warna baru dan nuansa yang lebih segar yang tentu saja mendukung produktivitas kerja dan kondusivitas serta sinergi antar sumber daya manusia aparatur baik dalam kerangka hubungan horizontal dan hubungan vertical yaitu antara pimpinan dan bawahan secara timbal balik.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ari Prabowo**

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, ²⁹ Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

*Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Ari Prabowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri	1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95
		2	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88
		3	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93
		4	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan Komunikasi, dan Informasi Publik	5	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik KKP (indeks)	97
		6	Nilai Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	96
		7	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	95
		8	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	90
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro HKLN	9	Nilai PM SAKIP Biro HKLN (nilai)	87
		10	Indeks Profesionalitas ASN Biro HKLN (indeks)	87
		11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro HKLN (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro HKLN (%)	85
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	100
		14	Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	5.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	23.175.222.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2025		28.672.222.000

Jakarta, 05 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Ali Prabowo